

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., dan Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Arditia, R. (2013). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol. 1(3) Mei 2013.
- Bratakusumah, D.S., dan Solihin, D. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harianti, A., Veronica M.S., Nur., Setiawan, S., dan Iskandar, D. (2012). *Statistika II*. Edisi Pertama, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Hartono, J. (2013). *Metode Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Kelima, BPFE, Yogyakarta.
- Ismail, T. (2011). *Paradigm Change of Local Tax*. *Journal of Administrative Science & Organization*, Vol. 18(1), hal. 33-42.
- Kusuma, K.A.A. dan Wirawati, P. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 5(3), hal. 574-585.
- Lainutu, A. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, Vol. 1(3), hal. 374-382.
- Markus, M., dan Lalu, H. (2005). *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muliari, N.K., dan Setiawan, P.E. (2011). Pengaruh Presepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 6(1) Januari 2013.

Prameka, A.S., dan Indrawati, N.K. (2013). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang* diakses dari <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/358> pada tanggal 15 Oktober 2014.

Putri, G.T.F. (2010). Tinjauan Prosedur Pemberian Kredit pada Primkopad Pusdik Passus, 14 Agustus 2010 diakses dari <http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-guruhtikaf-21713> pada tanggal 18 Oktober 2014.

Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3262.

_____. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

_____. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.

_____. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049.

Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Keenam, Salemba Empat, Jakarta.

Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama. Bandung

Siregar, A. (2009). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.

Sunjoyo, Setiawan, R., Carolina, V., Magdalena, N., Kurniawan, A. (2013). *Aplikasi SPSS untuk SMART Riset*. Alfabeta, Bandung.

Tahwin, M. (2013). Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18(2), hal. 136-143.

Walikota Bandung. (2011). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20.

Wirasatya, K.Y., dan Latrini, M.Y. (2012). Pengaruh Desentralisasi BPHTB terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Bandung, *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 1(2) Desember 2012.